



Article Informations
Corresponding Email:
deriaaspriyani2596@gmail.com

Received: 15/08/2025; Accepted:
10/01/2026; Published: 26/02/2026

KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DALAM PENGADAAN PESAWAT TEMPUR DASSAULT RAFALE DARI PRANCIS TAHUN 2020-2024

Deria Aspriyani

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) masih belum tercapai sepenuhnya sehingga Indonesia melakukan kerja sama dengan Prancis untuk pengadaan pesawat tempur Dassault Rafale dalam rangka pemenuhan MEF. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan teori neorealisme dan kepentingan nasional menurut K.J. Holsti yang dibagi menjadi tiga yaitu, *Core Values*, *Middle Range*, dan *Long Range*. Pertama, core values sebagai bagian dari pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) untuk memperkuat pertahanan perbatasan seperti di Laut Natuna Utara. Kedua, middle range untuk mendorong kemandirian industri pertahanan melalui program transfer of technology dengan Prancis. Ketiga, long range untuk memperlancar hubungan bilateral dengan Prancis dan membuka peluang bagi negara lain untuk ikut menjaga perdamaian melalui diplomasi dan kerja sama seperti yang dilakukan oleh Indonesia dan Prancis.

Kata Kunci: Alutsista, MEF, Pesawat Tempur Dassault Rafale, Kepentingan Nasional, Keamanan dan Pertahanan

Abstract

The fulfillment of the Minimum Essential Force (MEF) has not been fully achieved so that Indonesia cooperates with France to procure Dassault Rafale fighter aircraft in order to fulfill MEF. This research was conducted with a qualitative approach using descriptive research using the theory of neorealism and national interests according to K.J. Holsti which is divided into three, namely, Core Values, Middle Range, and Long Range. First, core values as part of the fulfillment of the Minimum Essential Force (MEF) to strengthen border defenses such as in the North Natuna Sea. Second, middle range to encourage the independence of the defense industry through a transfer of technology program with France. Third, long range to strengthen bilateral relations with France and open up opportunities for other countries to participate in maintaining peace through diplomacy and cooperation as carried out by Indonesia and France.

Keywords: *Defense Equipment, MEF, Dassault Rafale Fighter, National Interest, Security and Defense.*

PENDAHULUAN

Keamanan nasional merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi suatu negara, dalam konsepsi keamanan nasional itu sendiri memiliki keterkaitan erat dengan tujuan utama dari negara sebagai sebuah institusi sosial dan politik. Keamanan nasional merupakan syarat utama bagi suatu negara untuk dapat menjamin perlindungan terhadap masyarakat yang berada di dalam wilayah teritorialnya dari berbagai bentuk ancaman, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tanpa adanya sistem keamanan nasional yang kuat dan terstruktur, negara akan kesulitan dalam menjaga stabilitas politik, kedaulatan wilayah, serta ketertiban sosial yang menjadi dasar bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar dengan kurang lebih terdapat 17.000 pulau yang berada di wilayah Indonesia dengan total luas wilayah daratan lautan, serta Zona Ekonomi Eksklusif yang mencapai sebesar 7,81 juta kilometer persegi. Posisi geografis Indonesia yang strategis berada di antara dua Samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik membuat Indonesia memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga perdamaian dan keamanan baik itu di kawasan Asia Tenggara maupun global. Luasnya wilayah yang dimiliki Indonesia juga membuat negara ini banyak berbatasan dengan negara-negara lain, hal ini memberikan tantangan sendiri bagi Indonesia untuk dapat melindungi kepentingan nasional dan memberikan keamanan bagi masyarakatnya.¹ Perlu strategi pertahanan yang cukup matang untuk bisa menjaga keamanan nasional di wilayah Indonesia baik itu di darat, laut, ataupun udara.

Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 membuat suatu kebijakan dalam pertahanan keamanan, khususnya perihal sumber daya manusia dan alutsista yang kita kenal sekarang sebagai *Minimum Essential Force* atau disingkat sebagai MEF. Tahun 2009, telah disusun

¹ Agatha, Vivia dan Ramadhani, Walia. "Berapa Luas Negara Indonesia? Ini Penjelasannya." (25 Maret 2023) Internet 12 Juni 2025. <https://www.tempo.co/sains/berapa-luas-negara-indonesia-ini-penjelasannya-205247>

Strategic Defence Review (SDR) yang merumuskan pokok-pokok pemikiran serta merekomendasikan langkah-langkah strategis untuk membangun *Minimum Essential Force* (MEF). Ketentuan ini kemudian ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2010 sebagai bagian dari postur ideal pertahanan negara.² MEF dibagi kedalam beberapa tahap dengan jarak 5 tahun pertahap. Tahap pertama MEF dimulai dari tahun 2010-2014, tahap kedua dari tahun 2015-2019, tahap ketiga dilaksanakan dari tahun 2020 hingga 2024, dan tahap keempat akan berlangsung dari tahun 2025 sampai 2029.³

Akhir masa MEF tahap ketiga memiliki target agar sudah mencapai 100% pada akhir tahun 2024. Akan tetapi pencapaian MEF pada tahap satu atau tahap dua masih berada di bawah target yang sudah ditetapkan. Pada MEF tahap satu capaiannya ada diangka 54,97%, sedangkan hingga tanggal 27 september 2019, MEF tahap dua baru mencapai 63,19% dari target yang sudah ditetapkan yaitu 75,54%.⁴ Pada tahap ketiga yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2024 Indonesia berusaha untuk memenuhi target *Minimum Essential Force*, salah satunya pemenuhan alutsista untuk TNI Angkatan Udara, seperti pesawat tempur baru, saat ini Indonesia hanya dapat mengandalkan sejumlah pesawat tempur yang sudah tua untuk melakukan tugas pengamanan di wilayah udara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan metode untuk menjelajah dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah kemanusiaan ataupun sosial. Menurut Creswell proses penelitian kualitatif akan melibatkan upaya-upaya penting seperti mengumpulkan data, mengajukan pertanyaan yang spesifik, menganalisa data secara induktif mulai dari tema yang khusus hingga ke tema yang umum, serta harus menjelaskan makna dari data, dalam penalaran induktif

² Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. "Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama." Internet, 20 Februari 2025. www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/Permenhan-Nomor-19-Tahun-2012-Lampiran-1.

³ Aida, Ade Nurul. "*Budget Issue Brief Politik dan Keamanan*." DPR RI. Vol. 1 No. 5, 2021

⁴ *Ibid*

pengumpulan pengetahuan dapat dimulai dengan melakukan observasi terhadap hal-hal khusus yaitu fakta yang kongkrit.⁵

Pendekatan teoritis yang digunakan adalah neorealisme yang diperkenalkan Kenneth Waltz menekankan bahwa perilaku negara ditentukan oleh struktur sistem internasional yang bersifat anarki, di mana tidak ada otoritas global yang mengatur hubungan antarnegara. Dalam kondisi ini, negara mengandalkan prinsip self-help, yaitu bertindak mandiri untuk menjaga keamanan, umumnya melalui peningkatan kekuatan militer atau membentuk aliansi untuk bertahan dalam lingkungan yang kompetitif. Penelitian ini juga menggunakan teori konsep Kepentingan Nasional menurut KJ Holsti yang dibagi kedalam tiga kategori *Core Values*, *Middle Range*, dan *Long Range*.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kondisi Alutsista Udara Indonesia

Sejumlah pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara harus diberhentikan dari tugas operasionalnya, pesawat tersebut adalah F-5 E/F Tiger II buatan Amerika Serikat. Faktor utama diberhentikannya pesawat tempur tersebut adalah karena usianya yang sudah terlalu tua dilihat dari Indonesia yang menggunakan pesawat tersebut yaitu 35 tahun.⁶ Penghentian operasional F-5 E/F Tiger II ini berdampak pada penurunan kemampuan TNI Angkatan Udara dalam menjaga kedaulatan udara, merespons berbagai potensi ancaman, serta berpartisipasi secara optimal dalam operasi militer. Selain itu, hal ini juga turut memengaruhi tingkat kesiapan operasional secara keseluruhan, karena jumlah alutsista yang tersedia menjadi semakin berkurang.

Selain pesawat tempur yang diberhentikan dari tugas operasionalnya, di Indonesia juga terdapat beberapa pesawat tempur yang umurnya sudah

⁵ Kusumastuti, Adhi dan Khoiron, Mustamil Ahmad. "Metode Penelitian Kualitatif." (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019) 2-3

⁶ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. "Pesawat Tempur F5 E/F Tiger II Pensiun setelah 35 Tahun Amankan Udara Indonesia" (26 April 2017) Internet 19 Juni 2025. <https://www.kemhan.go.id/itjen/2017/04/26/pesawat-tempur-f5-ef-tiger-ii-pensiun-setelah-35-tahun-amankan-udara-indonesia.html>

usang namun masih digunakan oleh TNI Angkatan udara untuk menjaga wilayah udara Indonesia. Pesawat tempur yang dimaksud adalah F-16AM/BM (*Lockheed F-16 Fighting Falcon*) buatan Amerika Serikat dan Hawk 200 (BAe Hawk) buatan Britania Raya. Kondisi ini dapat melemahkan kemampuan Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah udara serta dalam merespons potensi ancaman dari udara secara efektif. Selain itu, sistem deteksi dan pelacakan target pada pesawat yang sudah usang biasanya tidak lagi bekerja secara optimal, sehingga dapat mengurangi efektivitas pertahanan udara secara keseluruhan.

Jumlah Alutsista Angkatan Udara RI Tahun 2024

No	Jenis Alutsista	Jumlah
1.	Pesawat Tempur	48
2.	Helicopter	220
3.	Transport	88
4.	Training	109
5.	Other	1

Sumber: Global Military 2024, diolah.⁷

Menyadari hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan berkomitmen untuk melakukan modernisasi dan penambahan alutsista guna mengatasi kekurangan alutsista TNI Angkatan Udara. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui program pengadaan pesawat tempur dari beberapa negara mitra, termasuk salah satunya adalah Prancis.

SEJARAH KERJA SAMA INDONESIA DAN PRANCIS

⁷ Global Military. "Indonesian Air Force." Internet 25 Juli 2025. https://www.globalmilitary.net/air_forces/idn/

Hubungan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Prancis telah terjalin secara resmi sejak bulan September 1950, menandai dimulainya hubungan diplomatik yang solid antara kedua negara.⁸ Meskipun demikian, awal dari interaksi tidak langsung antara Indonesia dan Prancis sebenarnya telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, pada masa kolonial Hindia Belanda, di mana pengaruh budaya dan intelektual Prancis mulai masuk melalui jalur pendidikan, seni, dan politik. Seiring berjalannya waktu, hubungan tersebut berkembang secara bertahap mencakup berbagai bidang penting, seperti politik, pertahanan,

Pada tahun 1967 Indonesia dan Prancis memulai kerja sama pertahanan dengan mengirimkan sebanyak 399 siswa Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dan Latihan pada bidang militer di Prancis.⁹ Lalu kemudian pada tanggal 11 Juli 1996 Indonesia dan Prancis mulai menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk menyepakati kerja sama dalam bidang Bidang Logistik dan Pertahanan antara Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dengan French Ministry of Defense. Kerja sama ini terus diperkuat melalui penyelenggaraan forum *Military Bilateral Talks* yang melibatkan Markas Besar TNI dan pihak Prancis melalui Atase Pertahanan Prancis. Forum ini menjadi wadah strategis dalam membahas pengembangan kerja sama di berbagai bidang, seperti pendidikan militer, pertukaran informasi strategis, pelatihan bersama, serta penyusunan kerangka dialog pertahanan yang lebih menyeluruh. Hubungan pertahanan Indonesia dan Prancis yang awalnya bersifat teknis dan pelatihan kini berkembang menjadi kemitraan strategis yang melibatkan industri pertahanan dan diplomasi militer yang semakin erat.

Pada tahun 2020 dalam rangka merayakan ke-70 tahun hubungan bilateral Indonesia dan Prancis, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis untuk bertemu dengan

⁸ Kementerian Luar Negeri RI. "Hubungan Bilateral." (19 Juni 2024) Internet 8 Juli 2025. <https://kemlu.go.id/marseille/kebijakan/hubungan-bilateral/hubungan-bilateral?type=publication>

⁹ Kementerian Pertahanan RI. "Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis Tentang Kerjasama Pertahanan." Internet 12 Juli 2025. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/komisi1-RJ-20240621-044550-4985.pdf>

Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly.¹⁰ Dalam kunjungan kenegaraan tersebut keduanya membahas untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan kerja sama pertahanan pada bidang industri pertahanan, bahkan pada pertemuan tersebut Prabowo Subianto berkesempatan untuk bertemu dengan beberapa perusahaan industri pertahanan Prancis, ia berharap pada kunjungan tersebut kedua negara bisa melakukan kerja sama dalam kemajuan industri pertahanan melalui pengadaan dan alutsista dan transfer teknologi, juga peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.

Selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2021 dalam kunjungan kerja Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan RI memenuhi undangan dari Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly, untuk menandatangani kesepakatan kerja sama pada bidang pertahanan (*Defence Cooperation Agreement*), kesepakatan kerja sama ini merupakan tindak lanjut kedua negara dari hasil pertemuan pada tahun 2020. Melalui kesepakatan kerja sama antara kedua negara ini membuka peluang untuk memaksimalkan potensi dan keunggulan kekuatan dari masing-masing negara seperti pengembangan keamanan siber, kerja sama alutsista berupa pengadaan serta transfer teknologi untuk memajukan kapasitas industri pertahanan nasional.

Pada tahun 2022 Indonesia dan Prancis menyepakati kerja sama pengadaan pesawat tempur Dassault Rafale sebanyak 6 unit untuk tahap pertama, tahap kedua pada tahun 2023 sebanyak 18 unit, dan tahap yang terakhir di tahun 2024 sebanyak 18 unit dan baru akan sampai di Indonesia pada tahun 2026. Kedepannya perawatan pesawat tempur ini akan dilakukan oleh PTDI, saat ini sejumlah teknisi yang berasal dari PTDI sudah dikirim ke Prancis guna mendukung kesiapan dalam proses pemeliharaan pesawat tempur Dassault Rafale.¹¹ Kerja sama pertahanan Indonesia dan

¹⁰ Kementerian Pertahanan RI. "Kunker Menhan RI ke Prancis, Tandai 70 Tahun Hubungan Diplomatik RI - Prancis." (13 Januari 2020) Internet 12 Juli 2024. <https://www.kemhan.go.id/2020/01/13/kunker-menhan-ri-ke-Prancis-tandai-70-tahun-hubungan-diplomatik-ri-Prancis.html>

¹¹ PT Dirgantara Indonesia. "Dirgantara Indonesia Siap Tangani Perawatan Jet Tempur Rafale." (28 Februari 2025) Internet 13 Juli 2025. <https://indonesian->

Prancis mencakup pengadaan peralatan pertahanan, produksi bersama, penelitian dan pengembangan, serta dukungan. Hal ini sejalan dengan pengadaan Pesawat Tempur Dassault Rafale oleh Indonesia, tidak hanya pengadaan saja tetapi juga mencakup transfer teknologi dan pelatihan teknisi.

KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DALAM PENGADAAN PESAWAT TEMPUR DASSAULT RAFALE DARI FRANCIS TAHUN 2020-2024

1. Core Values

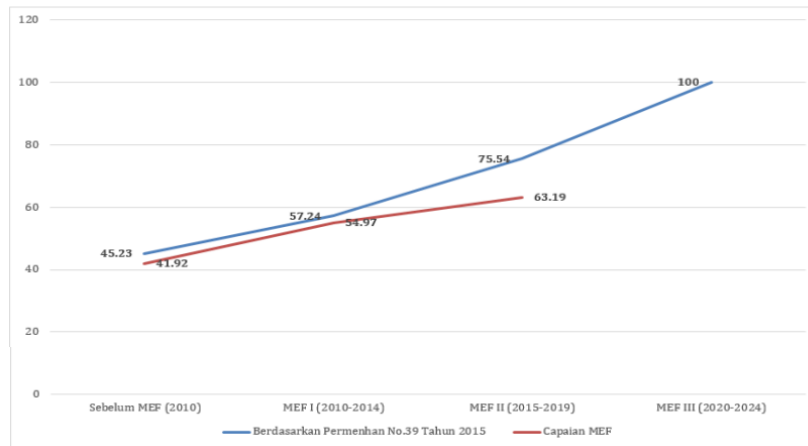
KJ. Holsti menjelaskan bahwa dalam *core values* kepentingan merupakan suatu hal yang sangat vital karena menyangkut langsung dengan peran suatu negara dalam lingkup internasional. Kepentingan suatu negara akan ditentukan dari bagaimana cara mereka memutuskan suatu kebijakan. Oleh karena itu kebijakan yang diambil oleh suatu negara akan bertujuan untuk meningkatkan pertahanan, keamanan serta kestabilan.

a. Pemenuhan *Minimum Essential Force* untuk Membentuk Postur Pertahanan Nasional yang Kuat

Minimum Essential Force (MEF) atau Kekuatan Pokok Minimum merupakan sebuah konsep strategi di bidang pertahanan negara yang diterapkan di Indonesia dengan tujuan memastikan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki tingkat kekuatan minimum yang diperlukan untuk menjaga keamanan, dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). MEF tidak dimaksudkan untuk membangun kekuatan militer yang sangat besar atau terlibat dalam perlombaan senjata, melainkan untuk menyediakan postur pertahanan yang cukup dan kuat agar mampu menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan efektif. Dalam penerapannya, MEF disusun berdasarkan skala prioritas yang mencakup ancaman aktual, kemampuan ekonomi nasional, dan penyesuaian dengan kebutuhan pembangunan postur pertahanan

negara secara bertahap. Dengan demikian, MEF menjadi landasan penting bagi Indonesia agar selalu mampu menjaga kedaulatan dan memberikan rasa aman kepada seluruh rakyatnya.

Data Capaian Pembangunan Alutsista Tiap Tahapan MEF



Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2019, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam (2020)¹²

Berdasarkan data di atas *Minimum Essential Force* (MEF) memiliki target 100% pada tahap ketiga, namun faktanya pada tahap kedua saja MEF belum mampu mencapai target, oleh karena itu pada tahap ketiga yang ada pada periode tahun 2020-2024 Indonesia perlu berusaha lebih maksimal lagi dalam mengejar ketertinggalan tersebut agar dapat tercapainya postur pertahanan nasional yang kuat guna mengantisipasi berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan nasional. Guna memenuhi target *Minimum Essential Force* (MEF), salah satu langkah strategis yang diambil oleh Indonesia adalah menjalin kerja sama pertahanan dengan Prancis, yang dikenal sebagai salah satu negara pengekspor alat utama sistem senjata (alutsista) terbesar di dunia. Prancis memiliki industri pertahanan yang maju dan terintegrasi, yang didukung oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Dassault Aviation, Naval Group, MBDA, Thales, Airbus Defence & Space, dan Safran.

Pada tahun 2022 Indonesia dan Prancis melakukan penandatanganan kontrak pesawat tempur Dassault Rafale yang

¹² Aida, Ade Nurul. "Budget Issue Brief Politik dan Keamanan." DPR RI. Vol. 1 No. 5, 2021

dilakukan oleh CEO Dassault Aviation Eric Trappier dan Marsekal Pertama TNI Yusuf Jauhari, Kepala Badan Pengadaan Kementerian Pertahanan Indonesia. Penguatan kerja sama pada bidang pertahanan yang mencakup pengadaan alutsista tersebut diwujudkan secara konkret melalui rencana pengadaan pesawat tempur Dassault Rafale dengan jumlah yang mencapai 42 unit, hal ini menjadi momen yang sangat penting bagi kedua negara karena ini menjadi kali pertama Indonesia mempercayakan Prancis untuk membantu pengadaan pesawat tempur dalam upaya memenuhi *Minimum Essential Force* (MEF).

b. Pengadaan Pesawat Tempur Dassault Rafale Sebagai Strategi Menghadapi Ancaman di Kawasan Laut Natuna Utara

Laut Natuna Utara merupakan kawasan yang hingga hari ini masih menjadi bahan sengketa wilayah dengan China, bahkan beberapa negara ASEAN pun pernah ikut mempermasalahkan klaim Laut Natuna Utara seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Sengketa wilayah di kawasan Laut China Selatan bermula pada tahun 1947 di mana China membuat peta dengan mengklaim hampir seluruh kawasan tersebut termasuk kawasan Laut yang berada di wilayah Indonesia yang sekarang sudah diberi nama menjadi Laut Natuna Utara, selain membuat klaim China juga membuat Sembilan garis putus-putus atau *Nine Dash Line*.¹³ Hingga kini China masih menggunakan *Nine Dash Line* sebagai dasar historis mereka untuk mengklaim wilayah seluas 2 juta kilometer persegi, klaim tersebut sangat berdampak buruk bagi Indonesia karena dengan adanya hal tersebut Indonesia kehilangan wilayah perairan hingga mencapai 83.000 km persegi atau sekitar 30% dari luas Laut Natuna Utara.¹⁴

Laut Natuna Utara merupakan wilayah strategis Indonesia yang memiliki kekayaan alam melimpah, baik dari sektor kelautan maupun

¹³ Adhi, Irawan Sapto. "Apa Itu *Nine Dash Line* yang Sering Dipakai China untuk Klaim Natuna?" (4 Desember 2021) Internet 23 Juni 2025. <https://internasional.kompas.com/read/2021/12/04/150000970/apa-itu-nine-dash-line-yang-sering-dipakai-china-untuk-klaim-natuna>

¹⁴ *Ibid*

energi. Sumber daya lautnya mencakup beragam jenis ikan seperti demersal, pelagis kecil, ikan karang, lobster, rajungan, kepiting, udang penaeid, hingga cumi-cumi, dengan potensi hasil laut mencapai sekitar 500 ribu ton per tahun.¹⁵ Selain itu, wilayah ini juga menyimpan cadangan energi yang signifikan, termasuk cadangan gas Blok Natuna D-Alpha sebesar 222 triliun kaki kubik, menjadikannya salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, serta potensi minyak hingga 36 juta barel. Dengan kekayaan tersebut, Natuna Utara memiliki nilai strategis dan ekonomis tinggi, serta menjadi bagian penting dalam peta energi nasional Indonesia.¹⁶

Posisi strategis Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan juga menjadikannya rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran kedaulatan. Indonesia mulai terlibat dalam sengketa wilayah di kawasan Laut Cina Selatan pada tahun 2010 ketika China secara sepihak mengklaim bahwa kawasan tersebut merupakan miliknya berdasarkan historis, klaim yang dikeluarkan oleh China tersebut juga mencakup wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia. Semenjak klaim sepihak yang dikeluarkan oleh China wilayah tersebut menjadi sering terjadi konflik seperti memanasnya isu keamanan dengan terjadinya berbagai macam pelanggaran wilayah dan pengambilan sumber daya laut secara illegal oleh kapal-kapal nelayan yang berasal dari China, ketika Indonesia bertindak dengan cara menahan kapal tersebut China melayangkan nota protes dengan meminta agar kapal-kapal tersebut segera dilepaskan, hal ini terjadi pada tahun 2013.¹⁷

Pada tahun 2016 Indonesia kembali menghadapi kasus yang sama di mana terdapat tujuh kapal nelayan dan dua kapal coast guard milik China berada di Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut. Selain kapal-kapal

¹⁵ Effendi, Satrio Arga. “Potensi dan Problematika Menjaga Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara” DPR RI. Vol. 01, Ed 21 (2021)

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Indonesia. “Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara.” (15 Januari 2020) Internet 16 Juli 2025. <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/politik/sengketa-di-kawasan-laut-natuna-utara>

China terdapat juga kapal-kapal nelayan asal Vietnam yang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal hal ini dibuktikan dengan keberadaan puluhan kapal ikan yang berasal dari Vietnam dan langsung dikawal oleh kapal pemerintah Vietnam ditemukan di wilayah tumpang tindih klaim ZEE antara Indonesia dan Vietnam.

Penguatan pertahanan di wilayah ini, termasuk modernisasi alutsista seperti pengadaan pesawat tempur Rafale, menjadi bagian penting dari strategi Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan memproteksi kepentingan nasionalnya di kawasan Laut Natuna Utara. Pengadaan pesawat tempur Dassault Rafale yang akan ditempatkan di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru dekat dengan kawasan Laut Natuna Utara menunjukkan bahwa Indonesia melihat kawasan Laut China Selatan sebagai wilayah dengan potensi konflik yang tinggi saat ini. Langkah ini menegaskan kesiapan Indonesia untuk menghadapi segala bentuk gangguan terhadap keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan memiliki kekuatan yang lebih modern dan canggih dibandingkan pesawat tempur generasi sebelumnya. Pesawat Rafale dirancang untuk memiliki kemampuan multirole yang unggul, baik dalam misi tempur udara, serangan darat, maupun pengintaian.

2. Middle Range

Menurut KJ Holsti, Middle adalah usaha pemerintah untuk meningkatkan citra negaranya, biasanya dilakukan dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemampuan militer, dan kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan. Usaha ini bisa dilihat dari bagaimana Indonesia berusaha melakukan kerja sama dengan Prancis dalam pengadaan pesawat tempur Dassault Rafale dengan dibarengi transfer of teknologi untuk mendukung kemandirian industri pertahanan lokal di masa depan.

Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menyatakan bahwa beberapa komponen dari pesawat tempur Rafale akan mulai diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari kesepakatan kerja sama

industri dan transfer teknologi dengan Dassault Aviation milik Prancis. Langkah ini tidak hanya mencerminkan komitmen dalam membangun kemandirian industri pertahanan nasional, tetapi juga membuka peluang bagi PT Dirgantara Indonesia untuk mengembangkan kemampuan teknis, produksi, serta fasilitas pemeliharaan dan perawatan (*Maintenance and Repair*). Dengan keterlibatan aktif dalam pengembangan pesawat Dassault Rafale, PT Dirgantara Indonesia diharapkan kedepannya dapat meningkatkan kualitas SDM dan daya saing teknologi pertahanan dalam negeri.

Sebagai bagian dari program offset dalam pengadaan pesawat tempur Dassault Rafale, Indonesia memperoleh keuntungan strategis melalui keterlibatan industri pertahanan dalam negeri, khususnya PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Offset tersebut mencakup transfer pengetahuan dan teknologi, termasuk pengembangan *Computer Based Training* (CBT). Direktur Utama PTDI menjelaskan bahwa PTDI telah secara aktif mengembangkan sistem CBT yang digunakan sebagai sarana pelatihan digital bagi teknisi dan operator pesawat tempur Dassault Rafale. Sistem ini memungkinkan personel TNI AU maupun teknisi PT Dirgantara Indonesia untuk memperoleh pelatihan dasar secara mandiri menggunakan modul simulasi berbasis komputer.¹⁸

Kerja sama ini juga mencakup transfer teknologi *Electronic Warfare* (EW) kepada PT Dirgantara Indonesia (PTDI), PTDI juga akan berpartisipasi dalam *Engineering Work Package* (EWP) untuk pembangunan fasilitas *Maintenance, Repair & Overhaul* (MRO) serta *Production Work Package* (PWP) untuk pembuatan komponen komposit, selain itu, dalam program ini, Dassault Aviation turut mendukung PTDI dalam proses sertifikasi *European Aviation Safety Agency* (EASA)

¹⁸ Prasetyo, Wisnu. "PTDI Kirim Teknisi ke Prancis, Belajar Pesawat Rafale dan Kembangkan Drone MALE." (26 Februari 2025) Internet 18 Juli 2025. <https://kumparan.com/kumparannews/ptdi-kirim-teknisi-ke-prancis-belajar-pesawat-rafale-dan-kembangkan-drone-male>

untuk pesawat N219, yang akan membuka peluang pasar pesawat tersebut di tingkat global.¹⁹

3. *Long Range*

Merupakan kepentingan yang bersifat ideal dan strategis mencerminkan pandangan jangka panjang suatu negara dalam sistem internasional. Tujuannya lebih terfokus pada upaya memperkuat peran, pengaruh, dan posisi negara dalam tatanan global, seperti melalui promosi nilai-nilai tertentu atau mewujudkan perdamaian dunia.

Pengadaan pesawat tempur Dassault Rafale oleh Indonesia dari Prancis tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan udara nasional, tetapi juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Kontrak pembelian sebanyak 42 unit pesawat Rafale menjadi simbol keseriusan Indonesia dalam menjalin hubungan bilateral dengan Prancis, terutama di bidang pertahanan dan industri strategis.

Kerja sama ini memperkuat rasa saling percaya dan membuka ruang bagi kerja sama yang lebih luas, seperti transfer teknologi, pengembangan industri pertahanan dalam negeri, serta bersama-sama menjaga stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik. Tidak hanya membuka peluang kerja sama yang damai dan bersahabat bagi kedua negara saja, namun juga membuka peluang bagi negara lain untuk ikut menjaga perdamaian melalui diplomasi dan kerja sama seperti yang dilakukan oleh Indonesia dan Prancis. Kondisi hubungan bilateral yang kuat serta tumbuhnya rasa saling percaya dapat meminimalisir konflik yang mungkin terjadi, dengan begitu kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Prancis secara tidak langsung berkontribusi untuk mempromosikan perdamaian melalui diplomasi dan kerja sama bilateral dalam bidang pertahanan.

KESIMPULAN

¹⁹ IndoAviation Plus. "Buka Design Office, PTDI – Dassault Aviation Percepat Produksi Rafale di Indonesia." (3 Maret 2025). Internet 18 Juli 2025. <https://indoaviation.asia/buka-design-office-ptdi-dassault-aviation-percepat-produksi-rafale-di-indonesia/>

Kondisi keamanan nasional Indonesia yang kerap menghadapi berbagai konflik, seperti isu pelanggaran wilayah yang sering terjadi di daerah perbatasan, menjadi tantangan besar bagi keutuhan negara. Situasi ini mencerminkan lemahnya sistem pertahanan Indonesia dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman eksternal secara efektif. Kelemahan tersebut disebabkan oleh keterbatasan alat utama sistem senjata (alutsista) yang dimiliki, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Banyak alutsista yang digunakan oleh Indonesia sudah berusia tua dan tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi pertahanan modern, sehingga pengoperasiannya pun tidak mampu mendeteksi ataupun menangkal ancaman secara optimal.

Pengadaan pesawat tempur Dassault Rafale merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam rangka memenuhi target Minimum Essential Force (MEF) tahap ketiga. Namun, lebih dari sekadar memenuhi target tersebut, urgensi utama dari program ini adalah untuk memperkuat pertahanan di wilayah perbatasan, khususnya di sekitar Laut Natuna Utara. Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan di kawasan Laut China Selatan yang mencakup klaim sepihak China melalui konsep *Nine Dash Line* semakin meningkat, dan sebagian wilayah yang diklaim tersebut tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Situasi ini menempatkan kawasan tersebut sebagai salah satu titik rawan konflik. Oleh karena itu, pengadaan alutsista baru seperti pesawat tempur Rafale menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kemampuan pengawasan, respons cepat, bagi pertahanan udara Indonesia dalam menghadapi potensi pelanggaran kedaulatan dan juga menjaga stabilitas keamanan nasional.

REFERENSI

- Agartha, Vivia dan Ramadhani, Walia. "Berapa Luas Negara Indonesia? Ini Penjelasannya." (25 Maret 2023) Internet 12 Juni 2025. <https://www.tempo.co/sains/berapa-luas-negara-indonesia-ini-penjelasannya-205247>
- Adhi, Irawan Sapto. "Apa Itu *Nine Dash Line* yang Sering Dipakai China untuk Klaim Natuna?" (4 Desember 2021) Internet 23 Juni 2025.

<https://internasional.kompas.com/read/2021/12/04/150000970/ap-a-itu-nine-dash-line-yang-sering-dipakai-china-untuk-klaim-natuna>

- Aida, Ade Nurul. “*Budget Issue Brief Politik dan Keamanan.*” DPR RI. Vol. 1 No. 5, 2021
- Effendi, Satrio Arga. “*Potensi dan Problematika Menjaga Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara*” DPR RI. Vol. 01, Ed 21 (2021)
- Global Military. Indonesian Air Force. Internet 25 Juli 2025. https://www.globalmilitary.net/air_forces/idn/
- IndoAviation Plus. Buka Design Office, PTDI – Dassault Aviation Percepat Produksi Rafale di Indonesia. (3 Maret 2025). Internet 18 Juli 2025. <https://indoaviation.asia/buka-design-office-ptdi-dassault-aviation-percepat-produksi-rafale-di-indonesia/>
- Indonesia. “Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara.” (15 Januari 2020) Internet 16 Juli 2025. <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/politik/sengketa-di-kawasan-laut-natuna-utara>
- Kementerian Luar Negeri RI. “Hubungan Bilateral.” (19 Juni 2024) Internet 8 Juli 2025. <https://kemlu.go.id/marseille/kebijakan/hubungan-bilateral/hubungan-bilateral?type=publication>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. “Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama.” Internet 20 Februari 2025. www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/Permenhan-Nomor-19-Tahun-2012-Lampiran-1.
- Kementerian Pertahanan RI. “Kunker Menhan RI ke Prancis, Tandai 70 Tahun Hubungan Diplomatik RI – Prancis.” (13 Januari 2020) Internet 12 Juli 2024. <https://www.kemhan.go.id/2020/01/13/kunker-menhan-ri-ke-Prancis-tandai-70-tahun-hubungan-diplomatik-ri-Prancis.html>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. “Pesawat Tempur F5 E/F Tiger II Pensiun setelah 35 Tahun Amankan Udara Indonesia” (26 April 2017) Internet 19 Juni 2025. <https://www.kemhan.go.id/itjen/2017/04/26/pesawat-tempur-f5-ef-tiger-ii-pensiun-setelah-35-tahun-amankan-udara-indonesia.html>

Kementerian Pertahanan RI."Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis Tentang Kerjasama Pertahanan." Internet 12 Juli 2025. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/komisi1-RJ-20240621-044550-4985.pdf>

Kusumastuti, Adhi dan Khoiron, Mustamil Ahmad. "Metode Penelitian Kualitatif." (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019) 2-3

Prasetiyo, Wisnu. "PTDI Kirim Teknisi ke Prancis, Belajar Pesawat Rafale dan Kembangkan Drone MALE." (26 Februari 2025) Internet 18 Juli 2025. <https://kumparan.com/kumparannews/ptdi-kirim-teknisi-ke-prancis-belajar-pesawat-rafale-dan-kembangkan-drone-male>

PT Dirgantara Indonesia. "Dirgantara Indonesia Siap Tangani Perawatan Jet Tempur Rafale." (28 Februari 2025) Internet 13 Juli 2025. <https://indonesian-aerospace.com/id/media/berita/detil/1409/dirgantara-indonesia-siap-tangani-perawatan-jet-tempur-rafale>